

EFEKTIVITAS SATUAN INTELKAM DALAM MEMBANTU SATUAN RESKRIM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA¹

Oleh Inge Ajeng Larasati²

ABSTRAK

Satuan Intelkam semestinya dapat menunjang kinerja satuan reskrim untuk pengungkapan kasus tindak pidana sehingga diperoleh data empiris dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap efektivitas satuan intelkam dalam membantu satuan reskrim mengungkap tindak pidana di Polres Blora serta untuk mengetahui faktor yang menghambat efektivitas satuan intelkam untuk membantu satuan reskrim dalam pengungkapan tindak pidana di Polres Blora. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dapat dipaparkan bahwa (1) satuan intelkam Polres Blora dalam membantu satuan reskrim dalam pengungkapan tindak pidana belum efektif dan (2) bantuan satuan intelkam kepada satuan reskrim dalam mengungkap kejahatan mengalami hambatan yang disebabkan oleh faktor kurang berfungsinya saluran komunikasi formal, struktur wewenang organisasi yang menghambat kecepatan laju informasi, spesialisasi pekerjaan yang justru menghambat kecepatan informasi, dan kepemilikan informasi. Berdasarkan simpulan tersebut disarankan agar (1) melakukan komunikasi secara langsung dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, (2) memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan tugas satuan intelkam kepada semua anggota, (3) melengkapi satuan intelkam dengan petunjuk lapangan dan petunjuk teknis, (4) mengadakan pertemuan antara satuan intelkam dan satuan reskrim untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria informasi yang harus dipenuhi untuk suatu tindak pidana.

Kata kunci: efektivitas, satuan intelkam, satuan reskrim, kerja sama, tindak pidana

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan Polri dalam penanganan kasus kejahatan, meru-

pakan hasil kerja sama dari seluruh fungsi teknis kepolisian terutama Satuan Intelkam dan Satuan

¹ Diolah oleh Drs. Wagiran, M.Hum. dari Tugas Akhir (TA) Terbaik tahun 2009 Detasemen Rinaksa Sakalamandala dengan pembimbing oleh Kompol Drs. Hadi Subroto.

² Alumni Akpol Angkatan 41

Reskrim. Hal tersebut menyiratkan bahwa dibutuhkannya kerjasama dalam melaksanakan tugas kepolisian, seperti penyidikan dan penyelidikan. Koordinasi Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan dengan bentuk mekanisme penanganan yang terpadu. Kerja sama antara Satuan Reskrim dengan Satuan Intelkam merupakan salah satu upaya memaksimalkan kinerja Polri dalam pengungkapan kasus kejahatan dimana Satuan Intelkam bertindak mengawasi, menyertai dan mengakhiri dan Satuan Reskrim melengkapi dengan tindakan represifnya. Agar kerjasama tersebut dapat berjalan seperti harapan maka diatur mekanisme secara terpadu mengenai hubungan dan tata cara kerja dengan PEDOMAN/186/III/2007/INTELKAM. Serta mengenai batas ambang kewenangan masing-masing fungsi.

Dalam pelaksanaan operasi rutin kepolisian terdapat dua hal yang berkaitan dengan tugas satuan reskrim dan intelkam yaitu penanganan informasi yang diperoleh dan penanganan pelaporan/pengaduan untuk peningkatan keterpaduan fungsi kegiatan penanggulangan kriminalitas. Banyaknya aspek yang ditangani oleh satuan intelkam menyebabkan fokus akan penanggulangan kriminalitas tentang kasus kejahatan menjadi terabaikan.

Pelaksanaan pengumpulan pulbaket untuk mencari informasi disesuaikan dengan kebutuhan untuk penyusunan analisa kriminal dengan mengadakan pendekatan intel yang mencakup karakteristik, anatomi, motivasi dan latar belakang dari sasaran yang menjadi perhatian pimpinan. Salah satu proses operasional intelkam setelah melaksanakan pulbaket adalah pembuatan produk intel yang berguna sebagai media informasi kepada pimpinan mengenai situasi yang terjadi, perkembangan kegiatan serta fakta yang ditemukan terkait dengan penugasan. Satuan Intelkam mengirimkan hasil lidik berupa laporan informasi hasil penugasan kepada fungsi reskrim. Setiap informasi yang diterima, menurut prosedur yang baku harus dibuat dalam bentuk produk intel, baik berupa laporan informasi, Laporan informasi khusus ataupun bentuk yang lain.

Dalam pembuatan produk intel ini, dibutuhkan informasi dan waktu penyampaian produk yang tepat sehingga dapat tepat guna. dalam pelaksanaannya penyampaian produk intelkam tidak tepat waktu sehingga mendorong satuan reskrim mencari sendiri informasi yang dibutuhkan untuk efisiensi kerja.

Polres Blora merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan basis Operasional Intelkam

dengan kemampuan operasional dasarnya meliputi penyelenggaraan system operasi, penguasaan intel dasar, intel aktual dan kemampuan menghasilkan produk intel sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Satuan Intelkam Polres Blora sebagai salah satu fungsi Operasional Polri di tingkat Polres juga mengemban fungsi di bidang pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pengungkapan kasus kejahatan, dituntut untuk selalu menampilkan kinerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang prima. Dalam hal pengungkapan kasus kejahatan, Satuan intelkam mengemban tanggung jawab sebagai *early warning* dan *early detection* yang membantu satuan reskrim dalam hal pemberian informasi mengenai kejahatan yang terjadi. Tuntutan ini bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sepele karena masyarakat dewasa ini menuntut adanya kecepatan, ketepatan dan koordinasi dalam pengungkapan kejahatan sehingga dapat terbangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*) kepada institusi Kepolisian.

Blora merupakan wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana sebagian wilayahnya dipenuhi oleh tanaman jati yang menjadi karakteristik wilayah Blora yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa tengah dengan 16 kecamatan. Kepadatan

penduduk yang tergolong tidak sebanding dengan luas wilayahnya tidak menjauhkan Blora dari Kejahatan. Dari data yang diperoleh dari Polres Blora bahwa tindak pidana yang terjadi di tahun 2009 berjumlah 285 kasus dan telah diselesaikan 241 kasus. Dari 285 kasus yang terjadi, terdiri dari beranekaragam jenis kasus. Jenis kasus tersebut antara lain curas, curat, curanmor, kebakaran, pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, illegal logging.

Melihat bahwa pelaksanaan koordinasi Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus kejahatan, maka kepolisian perlu melaksanakan analisis atau evaluasi kinerja dari efektivitas Satuan Intelkam dalam menunjang kinerja satuan reskrim untuk pengungkapan kasus kejahatan sehingga akan diperoleh data empiris dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan program kedepan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada efektivitas Satuan Intelkam dalam membantu Satuan Reskrim mengungkapkan tindak pidana di Polres Blora. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui efektivitas satuan intelkam untuk membantu satuan reskrim dalam pengungkapan tindak pidana di Polres Blora. Dan (2) Untuk mengetahui faktor yang

menghambat efektivitas satuan intelkam untuk membantu satuan reskrim dalam pengungkapan tindak pidana di Polres Blora.

B. LANDASAN TEORETIS

1. Fungsi Intelijen

Menurut *Ensiklopedia Indonesia* (1989) efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu telah mencapai tujuannya. Adapun efektivitas menurut Pringgodogjo (1973: 29) adalah menunjukkan taraf tercapainya suatu efektif apabila itu mencapai tujuannya. Secara ideal taraf efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti. Lebih ditegaskan oleh Madya Kasihadi (1985: 54) bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana apa yang direncanakan dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif pada kegiatan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa satuan intelkam dikatakan efektif membantu satuan reskrim bila bantuan tersebut dapat digunakan untuk membantu mencapai tujuan, yakni mengungkap suatu kasus kejahatan.

Intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan tugas-tugas kepolisian, sebab organ intelijen berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan satuannya untuk *early warning* dan *early detection*.

Intelijen mengandung pengertian kegiatan intelijen, produk-produk intelijen maupun organisasi intelijen. Sebagai kegiatan intelijen esensinya adalah *to detect, to identify, to for warn (warning) and to anticipate* dalam pengertian kegiatan-kegiatan pengamanan maupun kegiatan penggalangan. Oleh karena itu, dalam lingkungan Polri kita mengenal istilah intelijen memberikan *early detection and early warning*.

Intelijen Kepolisian adalah intelijen yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri, dan mempunyai tugas pokok (1) memberikan dasar dan arah bagi pengembangan kebijaksanaan serta tindakan baik dalam rangka kegiatan operasional maupun pembinaan Polri di semua bidang selaku penegak hukum, inti pembina kamtibmas, dan alat bantuan pertahanan dan kekuatan sosial (2) menyelenggarakan fungsi intelijen bagi kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian.

Adapun fungsi intelijen kepolisian adalah sebagai berikut: (1) membina dan mengemban fungsi Intelijen Polri yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, (2) menyelenggarakan upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman kamtibmas atau sumber gangguan kamtibmas khususnya kriminalitas, (3) menyelenggarakan upaya dalam rangka menciptakan

suatu kondisi tertentu di dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri, (4) menyelenggarakan pengamanan kedalam tubuh Polri, baik pengamanan personil, materil, informasi maupun kegiatan terhadap ancaman dan luar dan dalam tubuh Polri, (5) menyelenggarakan upaya pengamanan masyarakat, untuk menghilangkan kerawanan kamtibmas, termasuk pengawasan orang asing, (6) menyelenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, (7) menyelenggarakan pengamanan terhadap perencanaan dan hasil-hasil pembangunan Nasional untuk mencegah tumbuhnya kondisi kriminogen, (8) menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan terhadap pengadaan, perincian, penggunaan, pemindahan, pengangkutan, penyimpanan, penimbunan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang bukan organik TNI/Polri, (9) menyelenggarakan pemberian bantuan operasi kepada Kepolisian Daerah, dan (10) menyusun perkiraan-perkiraan intelijen baik jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek untuk kepentingan operasional Polri.

2. Fungsi Reskrim

Reskrim merupakan kepanjangan dari Reserse Kriminal, dalam

bab ini akan dijelaskan konsep dari Reserse Kriminal yang digunakan sebagai landasan teori pada karya ilmiah ini. Sebagai penegak hukum dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka Polri melaksanakan tugas pokoknya yaitu melindungi, mengayomi, melayani, memelihara kamtibmas serta penegakkan hukum (UU RI No.2 tahun 2002). Fungsi Reserse merupakan satu-satunya unsur Polri yang melaksanakan tugas penegakkan hukum (*represif*) maupun penanggulangan suatu tindak kejahatan.

Represif atau penindakan adalah tugas Polri untuk memberantas, menanggulangi gangguan, ataupun ancaman kamtibmas yang sudah terjadi (melakukan penegakkan hukum/tindakan hukum) (Diktat Akpol, Fungsi Teknis Reserse). Salah satu contohnya ialah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, melakukan penyidikan. Keseluruhan kegiatan Reserse meliputi kegiatan-kegiatan berupa penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

3. Hubungan Tata Cara Kerja

Dalam hal pengaturan hubungan tata cara kerja antar satuan, jajaran satuan intelkam membantu satuan reskrim dalam penyelesaian

penyidikan dengan kegiatan mendahului, menyertai dan mengakhiri serta mengamankan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh satuan reskrim. Kerjasama ini didasarkan atas keterbukaan, ketulusan, kepercayaan, bertanggung jawab dan saling melengkapi.

Satuan Intelkam dengan satuan Reskrim merupakan fungsi operasional yang bertanggung jawab mensukseskan tugas pokok Polri melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakkan hukum dengan prioritas melakukan penyidikan dalam pengungkapan kriminalitas terhadap kejahatan yang termasuk di dalam kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara berimplikasi kontijensi dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Dalam kegiatan rutin kepolisian terdapat dua hal yang berkaitan dengan fungsi reskrim dan intel yaitu penanganan informasi dan penanganan laporan/ pengaduan yang diperlukan pengaturan HTCK-nya. Hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan keterpaduan kedua fungsi operasional pada penganggulangan kriminalitas.

Pelaksanaan penanganan informasi yang berasal dari berbagai sumber (masyarakat, instansi, pemerintah/swasta, hasil penyelidikan anggota Polri) merupakan masukan penting bagi pengungkapan suatu perkara tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya dapat dibedakan dua jenis informasi yang penanganannya masing-masing mengedepankan salah satu fungsi (reskrim/ intel)

Informasi yang memberi petunjuk tentang akan terjadinya suatu tindak pidana, fungsi intel kedeponkan dalam rangka melaksanakan tugas *early detection* dan *early warning*, terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi

Dalam pelaksanaannya, fungsi reskrim menerima informasi hasil penyelidikan awal dari intel, mengolah, menganalisis dan membuat rencana tindak lanjut (RTL), terhadap tindak pidana yang terjadi. Melanjutkan penyelidikan dan bila cukup dan terpenuhi unsur pidana maka dilanjutkan ke proses penyidikan.

Di lain hal, fungsi intel mengolah/menganalisa informasi yang diterima dan melaksanakan penyelidikan lanjutan guna melengkapi informasi awal yang di dapat, untuk mempertajam sasaran penyidikan reskrim. Mekanisme kerja: (1) intel memberikan hasil penyelidikan berupa produk-produk intel kepada fungsi reskrim dan (2) reskrim menerima dan menindaklanjuti produk intel yang diberikan dan membuat rencana tindak lanjut serta melakukan langkah-langkah konkrit.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2000:3). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada bagaimana hubungan satuan intelkam dengan satuan reskrim dalam upaya pengungkapan kasus kejahatan dengan melihat bagaimana informasi yang diberikan oleh satuan intelkam terhadap pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh satuan reskrim.

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Blora, Jawa Tengah khususnya pada Satuan Intel dan Satuan Reskrim dalam hal pengungkapan kasus kejahatan. Sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data ditentukan berdasarkan teknik *purposive* dengan pertimbangan nara sumber tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti (Sugiyono 2007:53-54).

Data primer pada penelitian ini adalah data mengenai jumlah kejahatan yang berhasil diungkap oleh

satuan reskrim Polres Blora serta data mengenai jumlah informasi yang dihasilkan satuan Intelkam dalam bentuk Laporan informasi yang diperoleh dari nara sumber dengan teknik wawancara mendalam. Data primer dilengkapi dengan data sekunder yang berasal dari dokumen yang terkait.

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki, disebut observasi langsung (Rachman 1997:77)

Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu di Sat Intelkam dan Sat Reskrim. tepatnya observasi langsung ter-

hadap petugas satuan Intelkam dan satuan reskrim dalam proses pengungkapan kasus kejahatan fasilitas dalam pengoperasian SMS Online, sedangkan obyek yang diamati adalah bentuk kegiatan yang dilakukan Satuan intelkam dalam pencarian informasi mengenai kasus kejahatan yang terjadi. Bentuk informasi yang diberikan kepada *user* (Kapolres) diserahkan oleh satuan intelkam dalam bentuk Laporan informasi (Moleong 2000:130).

Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Bentuk wawancara yang digunakan adalah "semi structured". Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menanyakan keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Suharsimi Arikunto, 1998).

Data yang terkumpul dianalisis secara induktif yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data (Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Bantuan Satuan Intelkam dalam Pengungkapan Tindak Pidana

Satuan intelkam merupakan salah satu satuan kepolisian Polres Blora yang berada di bawah pimpinan Kapolres. Satuan Intelkam berusaha sedapat mungkin menemukan dan mengidentifikasi setiap gejala dan kecenderungan yang mengarah pada timbulnya gangguan kamtibmas, dijalankan secara terus menerus dan untuk dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai *early detection* dan *early warning*, satuan intelkam Polres Blora membantu dalam pemberian informasi mengenai tindak pidana yang akan terjadi, sedang terjadi atau telah terjadi. Informasi tersebut diberikan dalam bentuk formal maupun informal, yang berupa koordinasi antar satuan fungsi secara langsung atau laporan informasi yang diberikan oleh sat intelkam kepada user yang kemudian didisposisikan kepada satuan yang tepat.

Berikut ini akan ditampilkan jumlah laporan informasi yang dihasilkan oleh satuan intelkam Polres Blora selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1 Jumlah Laporan Polisi Selama 3 Tahun Terakhir

No	Bulan	Jumlah Laporan Polisi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1	Januari	521	551	482
2	Februari	504	533	468
3	Maret	586	606	517
4	April	484	496	399
5	Mei	532	547	497
6	Juni	551	583	501
7	Juli	518	544	473
8	Agustus	525	534	480
9	September	567	599	505
10	Oktober	491	511	443
11	November	512	524	471
12	Desember	601	632	523
	JUMLAH			

Pada subbab ini, penulis akan mengolah semua data yang telah didapatkan pada saat penelitian dengan menggunakan teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah. Seperti yang telah tertulis pada Bab 1, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah, yaitu keefektifitasan satuan intelkam untuk membantu satuan reskrim Polres Blora dalam pengungkapan tindak pidana dan faktor-faktor yang menghambat satuan intelkam untuk membantu satuan reskrim dalam pengungkapan tindak pidana.

Dalam menjawab permasalahan yang pertama ini, penulis memberikan batasan mengenai efektifitas Satuan intelkam, yaitu adanya kesesuaian antara hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas satuan intelkam dalam pemberian

informasi mengenai tindak pidana kepada sat reskrim, dengan hasil yang dicapai dalam kenyataannya. Kesesuaian ini diteliti melalui pendekatan terhadap empat faktor yang mempengaruhi efektivitas seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1980:9)

Sesuai yang tertulis pada landasan teori tentang efektivitas dan HTCK antara fungsi reskrim dengan satuan intelkam, beberapa point penting dalam faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pendekatan karakteristik organisasi yakni (1) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan (2) menggunakan mekanisme kerja yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengungkap perkara tindak pidana.

Selanjutnya indikator ini telah dicocokkan dan dicek dengan ke-

nyataan di lapangan dengan hasil sebagai berikut.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan koordinasi pengungkapan kasus di satuan intelkam dan satuan reskrim, di masing-masing satuan sudah terdapat usaha dalam rangka pelaksanaan tugas per satuan maupun kegiatan koordinasi dalam rangka memberikan informasi mengenai tindak pidana ke pimpinan yang selanjutnya didelegasikan ke satuan reskrim. Mekanisme koordinasi yang dilakukan satuan reskrim maupun satuan intelkam dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk mempermudah pengungkapan kasus. Selain mekanisme koordinasi ditemukan juga fakta mengenai kelengkapan literatur yang dimiliki masing-masing satuan. Baik dari satuan intelkam dan satuan reskrim belum memiliki buku petunjuk pelaksanaan tugas dilapangan yang terbaru, terutama mengenai hubungan tata cara kerja antara satuan intelkam dan satuan reskrim. Hal ini merupakan kesimpulan penulis dari hasil observasi terhadap tempat, dimana di ruang satuan reserse maupun satuan intelkam terdapat buku register dan arsip-arsip laporan informasi.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 8 orang anggota Polres Blora yang dijadikan informan khususnya pada hal yang berhubungan dengan tercapainya tu-

juan pengungkapan tindak pidana diketahui bahwa 2 dari 8 informan (75%) menyatakan bahwa masing-masing satuan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan sebanyak 75% menyatakan bahwa satuan reskrim telah melaksanakan tugasnya dalam taraf sedang, di satuan intelkam sebanyak 62,5% menyatakan dalam taraf sedang. Hanya satuan intelkam yang terdapat 12,5% yang menyatakan melaksanakan tugas kurang. Dari hasil di atas, disimpulkan bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa masing-masing satuan melaksanakan tugas dalam taraf sedang.

Apakah dalam pelaksanaan tugasnya, anggota sat intel dan sat reskrim memiliki buku panduan terbaru mengenai pelaksanaan tugas? Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa 50% dari informan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya anggota dibekali dengan buku petunjuk pelaksanaan dan 50% menyatakan tidak dibekali oleh buku petunjuk pelaksanaan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, setelah di analisis ulang ternyata informan yang menyatakan tidak dibekali petunjuk lapangan merupakan anggota lapangan. Menurut mereka buku petunjuk memang ada tetapi buku tersebut merupakan terbitan lama, sehingga mereka tidak memiliki buku petunjuk yang memuat informasi-informasi terbaru.

Apakah dalam melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada seluruh pengguna (kapolres maupun satuan fungsi lain), satuan intelkam telah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada? Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa 62,5% informan menyatakan bahwa satuan intelkam dalam menyampaikan informasi telah sesuai dengan prosedur yang ada dan 37,5% menyatakan bahwa satuan intelkam tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam penyampaian informasi. Artinya ada sebagian dari informan yang merasakan bahwa satuan intelkam tidak menyampaikan informasi sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Selain dianalisis dengan membandingkan dengan hasil wawancara, penulis juga memiliki data mengenai jumlah laporan informasi yang dihasilkan oleh satuan intelkam dan jumlah laporan informasi yang masuk ke satuan reskrim dan ditindak lanjuti.

Bila dilihat dari jumlah laporan polisi yang dihasilkan oleh satuan intelkam perbulannya dan dibandingkan dengan laporan polisi yang masuk ke satuan reskrim jumlahnya sangat timpang. Hal ini membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan informasi mengenai tindak pidana, satuan intelkam tidak maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan diagram berikut.

Tabel 2 Tabel Jumlah Laporan Polisi yang masuk ke Sat Reskrim

No	Bulan	Jumlah Laporan Polisi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1	Januari	6	9	8
2	Februari	5	-	2
3	Maret	2	-	5
4	April	1	5	-
5	Mei	7	11	2
6	Juni	12	8	16
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	3	5	-
9	September	-	3	-
10	Oktober	-	-	5
11	November	-	-	-
12	Desember	1	-	-
	JUMLAH			

Bila penulis bandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi di lapangan terdapat fakta bahwa

ada-nya perbedaan hasil penelitian. Dari wawancara didapatkan hasil bahwa satuan intelkam te-

lah menjalankan tugasnya 62,5% dengan baik tetapi didapatkan hasil dari data di lapangan bahwa laporan informasi yang dihasilkan satuan intelkam hanya 0,5% yang diterima oleh sat reskrim. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa satu dari keempat indikator efektivitas belum terpenuhi

Indikator dari perspektif sistem ini berasal dari luar lingkungan dan dalam lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan hubungan organisasi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor tersebut sangat relevan bila diterapkan untuk menilai kinerja dari satuan intelkam. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki hasil sebagai berikut.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap laporan informasi yang dibuat oleh satuan intelkam mengenai keterdugaan keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi dan ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan. Ditemukan bahwa untuk informasi yang bersifat astagatra, satuan intelkam dapat melakukan kirka dengan baik dan mencantumkan-nya di dalam laporan informasi. Tetapi untuk informasi yang terkait dengan tindak pidana, satuan intelkam belum dapat menyajikan-

nya dengan data yang lebih akurat sehingga dilakukan kembali lidik awal untuk dinilai apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa satuan intelkam telah membuat laporan informasi mengenai kejadian

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 8 orang anggota polres Blora yang dijadikan informan khususnya pada butir-butir yang berhubungan dengan kualitas dari laporan informasi, digambarkan pada diagram berikut ini.

Pertanyaan: Selama ini bagaimanakah kualitas informasi yang terdapat dalam laporan informasi, apakah sudah memenuhi keterdugaan keadaan lingkungan, dan ketepatan persepsi mengenai kejadian yang akan, sedang ataupun sudah terjadi? Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa 5 dari 8 orang informan (62,5%) menyatakan bahwa laporan informasi yang dibuat oleh satuan intelkam sudah memenuhi keterdugaan keadaan lingkungan, dan ketepatan persepsi mengenai kejadian yang akan, sedang ataupun sudah terjadi. Sebanyak 37,5% yaitu 3 dari 8 orang informan yang merupakan anggota sat reskrim, menyatakan bahwa laporan informasi yang dibuat sat intelkam belum memenuhi keterdugaan lingkungan persepsi mengenai suatu kejadian belum tepat terutama mengenai tindak pidana. Artinya bahwa laporan informasi

yang berupa informasi tindak pidana belum memenuhi kriterdukaan dan ketepatan presepsi lingkungan.

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangangi tercapainya tujuan organisasi, sama halnya dengan satuan intelkam. Anggota sat intelkam merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku anggota sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Observasi yang diarahkan pada kasat intelkam dan anggotanya menunjukkan bahwa anggota satuan intelkam polres blora telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas individu guna memperbaiki kinerja anggota. Tetapi pelatihan yang diberikan belum merata secara keseluruhan kepada anggota sat intelkam terutama bintanga baru belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai fungsi teknis intelkam. Dan observasi yang diarahkan kepada anggota sat intelkam menunjukkan bahwa anggota intelkam belum ditempatkan sesuai dengan spesialisasinya agar dapat melaksanakan

tugasnya dengan maksimal. Anggota satuan intelkam yang belum memiliki kemampuan fungsi teknis intelkam mendapatkan pengetahuan langsung dari pengalaman ataupun meminta petunjuk anggota yang lebih senior.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang informan yang terdiri dari 3 orang anggota intelkam khususnya pada butir-butir yang berhubungan dengan keahlian anggota sat intelkam polres Blora dalam menerapkan pembuatan laporan informasi. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa 5 orang informan (100%) menyatakan semua anggota satuan intelkam dapat membuat laporan informasi meskipun tidak semua anggota intelkam mendapatkan pelatihan intelkam. Artinya, setiap anggota reserse memiliki kemampuan membuat laporan polisi meskipun tidak dibekali dengan pelatihan fungsi teknis intelkam.

Praktik manajerial berlangsung di setiap tingkatan kepemimpinan dari tingkatan kapolres hingga anggota. Dalam satuan intelkam, setiap anggota memiliki informan sebagai media untuk memperoleh informasi dari lingkungan. Informan ini diberikan arahan dan petunjuk mengenai pengambilan unsur-unsur keterangan untuk dirangkaikan menjadi informasi. Dalam hal ini anggota satuan intel berperan sebagai manajer yang dapat menentukan kebijakan untuk informan yang dibinanya.

Sebelum teknologi informasi berkembang seperti saat ini, anggota sat intelkam dan informan yang dibinanya behubungan secara langsung dengan mengadakan pertemuan di tempat tertentu untuk memberikan informasi hasil temuannya. Tetapi ketika teknologi berkembang, media untuk menyampaikan informasi juga mulai beralih ke media handphone. Pertemuan secara langsung sudah jarang dilakukan karena adanya media yang lebih praktis, tetapi dari hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu tingkat kepercayaan dan kebenarannya berkurang. Penyampaian secara tidak langsung menyebabkan pengontrolan informan secara berkala menjadi berkurang sehingga kinerja dari informan berkurang.

Berkaitan dengan pertanyaan apakah dengan berkembangnya informasi, mempermudah anggota satuan intelkam memperoleh informasi yang dapat dipercaya, diperoleh informasi bahwa 60% dari informan menyatakan adanya perkembangan informasi menyebabkan terbantunya anggota sat intel dalam melakukan pemantauan informan dan koordinasi. Tetapi di sisi lain, 40% menyatakan bahwa adanya perkembangan teknologi menyebabkan terhambatnya proses pemantauan dan koordinasi dengan informan. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan :

“Sekarang untuk menghubungi informan sering mengalami hambatan, contohnya saja ketika dihubungi melalui sms ataupun telepon mereka tidak membalas atau diangkat, padahal saya mau menanyakan kondisi yang terbaru. Dan ketika didatangi di tempat biasanya kami bertemu, informan tidak berada di tempat, Kalau dibandingkan dulu, informan lebih mudah ditemui dan dipantau dalam proses pulba- ket. Karana sulit untuk dipantau, informasi yang diberikan informan kurang akurat.”

Dari pernyataan salah satu di atas dapat dilansir bahwa adanya perkembangan teknologi juga menghambat anggota sat intelkam untuk melakukan pengontrolan dan pembinaan terhadap informan bi- naanya.

2. Faktor Penghambat Efektivitas Bantuan Satuan Intelkam dalam Mengungkap Tindak Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa faktor yang menghambat efektivitas satuan intelkam dalam membantu satuan reskrim dalam pengungkapan tindak pidana adalah komunikasi. Hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa terdapat kendala dalam penyaluran informasi, komunikasi yang dilaku-

kan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Lesikar diuraikan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi, yaitu saluran komunikasi formal, struktur wewenang, spesialisasi pekerjaan, dan kepemilikan informasi. Dari teori yang dikemukakan Raymond V. Lesikar akan direduksi dengan data hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan kepada para informan. Hasil reduksi data dan teori tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas satuan intelkam Polres Blora dalam membantu satuan reskrim dalam pengungkapan tindak pidana, antara lain sebagai berikut

a. Saluran komunikasi formal

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan fakta bahwa laporan informasi yang ditujukan kepada kapolres, tidak langsung dibaca oleh Kapolres untuk mendapatkan tindakan yang lebih lanjut. Informasi terhambat di meja kapolres, dikarenakan mobilitas kapolres yang sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan alur hubungan tata cara kerja satuan intelkam dengan satuan reskrim, setelah Laporan Informasi dikonsumsi Kapolres, maka Kapolres akan memerintahkan satuan fungsi yang terkait untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Seperti halnya jika ada

informasi mengenai tindak pidana maka akan didisposisikan kepada satuan Reskrim.

Dikarenakan terdapat hambatan di awal penyampaian informasi, hal tersebut juga berdampak kepada penindakan terhadap informasi yang di peroleh. Informasi yang lambat ditindak lanjuti oleh kapolres menyebabkan informasi mengenai tindak pidana terlambat sampai di sat reskrim hingga menyebabkan informasi tiba tidak tepat waktu dan tindak pidana tersebut tidak ditindak lanjuti.

Hal tersebut menghambat pengungkapan tindak pidana dan menyebabkan tidak efektifnya satuan intelkam dalam pemberian informasi sebagai *early detection* dan *early warning*.

b. Spesialisasi Pekerjaan

Hasil observasi menyatakan bahwa satuan intelkam dan satuan reskrim dalam struktur keorganisasian di Polres memiliki hubungan sejajar dan setara, tetapi yang membedakan kedua satuan ini adalah tugas dan wewenangnya masing-masing.

Meskipun terdapat perbedaan tugas dan wewenang, kedua satuan ini masih berhubungan dan bekerjasama dalam hal-hal tertentu, contohnya dalam pengungkapan tindak pidana.

Dikarenakan perbedaan tugas dan wewenang menyebabkan kedua satuan ini memandang sesuatu

hal dari sisinya masing-masing sehingga terkadang menyebabkan perbedaan persepsi. Hal yang konkrit adalah ketika laporan informasi yang dibuat satuan intelkam tidak ditindak lanjuti oleh satuan reskrim dikarenakan tidak memenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal ini terdapat perbedaan persepsi, sat intel menganggap jika sudah didukung dengan sumber yang lain maka informasi tersebut bernilai A1 tetapi satuan reskrim tidak menilainya sebagai informasi yang A1 dikarenakan tidak adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di laporan informasi tersebut.

c. Struktur wewenang

Dalam suatu organisasi seperti kepolisian memiliki struktur hierarki yang sedikit banyak masih melekat di anggotanya. Kemudahan dalam berkomunikasi kepada pimpinan menjadi salah satu kendala dalam penyampaian informasi. Keseganan terhadap pimpinan terkadang menyebabkan informasi tidak dapat diterima dengan baik. Seperti halnya jika laporan informasi telah tiba pada waktu yang tepat tetapi laporan tersebut tidak langsung dibaca sehingga informasinya tetap saja tiba tidak tepat waktu.

d. Kepemilikan informasi

Informasi yang didapatkan oleh satuan intelkam berasal dari berbagai sumber dan terdiri dari beranekaragam aspek. Informasi yang didapatkan oleh satuan in-

telkam merupakan informasi yang digunakan untuk kepentingan bersama sebagai *early detection* dan *early warning* sehingga informasi yang dimiliki oleh Satuan intelkam seharusnya dapat di berikan kepada satuan-satuan yang terkait, sehingga dapat tercipta situasi yang saling mendukung. Tetapi dalam kenyataannya informasi yang diperoleh belum dapat dimiliki oleh semua satuan atau dalam kata lain, masih ada satuan yang mengandalkan dengan kemampuannya sendiri untuk mengumpulkan informasi. Hal ini ditemukan dalam penelitian yang dilakukan penulis, karena seringkali keterlambatan informasi mengenai tindak pidana, sat reskrim memperdayakan informannya sendiri untuk mencari informasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa satuan intelkam belum efektif membantu sat reskrim dalam pengungkapan tindak pidana.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Efektivitas dari satuan intelkam Polres Blora dalam membantu satuan reskrim dalam pengungkapan tindak pidana belum dapat dikatakan efektif. Dapat dikatakan demikian karena dalam pengungkapan tindak pidana satuan intelkam memang memberikan bantuan kepada satuan reskrim dengan bentuk laporan informasi, tetapi dalam penyampaiannya belum dapat tiba tepat waktu dan menyebabkan in-

formasi yang diterima sudah tidak dapat digunakan kembali sehingga satuan reskrim menggunakan cara yang lain untuk memperoleh informasi. Muara dari indikator-indikator yang ada diperoleh berdasarkan teori yang digunakan penulis sebagai penguji dari keefektifitasan satuan intelkam Polres Blora.

Faktor penghambat yang muncul di satuan intelkam Polres Blora merupakan komunikasi dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Raymond V Lesikar diuraikan empat faktor yang mempengaruhi kefektifan komunikasi organisasi, yaitu saluran komunikasi formal, struktur wewenang organisasi, spesialisasi pekerjaan, dan apa yang disebut kepemilikan informasi.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas penulis menyarankan beberapa hal, antara lain (1) Melakukan komunikasi secara langsung, baik dengan atasan maupun dengan satuan fungsi lain dengan memanfaatkan teknologi yaitu dengan telepon maupun dengan media SMS untuk mendukung komunikasi tidak langsung yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, (2) Memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan tugas satuan intelkam kepada semua anggota untuk meningkatkan kemampuan anggota, (3) Melengkapi satuan intelkam Polres Blora dengan petunjuk lapangan dan petunjuk

teknis ataupun dengan peraturan perundang-undangan terbaru tuan reskrim yang mengatur satuan intelkam agar setiap anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, (4) Mengadakan pertemuan antara satuan intelkam dan sat reskrim untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria informasi yang harus dipenuhi untuk suatu tindak pidana, agar satuan intelkam dapat membantu satuan reskrim dalam pengungkapan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akpol. 2007. "Diktat Fungsi Tehnis Intelkam." Semarang: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- DVTA. 2010. "Pedoman Penelitian, Penulisan dan Tata Tulis Tugas akhir Taruna akademi Kepolisian Semarang."
- Moeljanto. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, Harry. 2009. "Diktat Fungsi Tehnis Reserse." Semarang: Akademi Kepolisian.

Pusat Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

Saronto, Y. Wahyu. 2001. *Intelijen*. Bandung: PT. Ekalaya Saputra.

Stoner, James. 1995. *Manajemen*. New Jersey: Pentice Hall.

Steers, Richard M. 1980. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Suwarni. 2009. *Perilaku Polisi*. Bandung: Nusa Media.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akpol-2007. *Intelijen Fungsi Utama*. Jakarta: Semarang: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Harlow, Suwandi. 2008. *Manajemen Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

CVTA 2010. *Bedoman Penelitian*. Penelitian dan Tesis Tula. Tulungagung: Akademi Kepolisian Semarang.

Harlow, Suwandi. 2008. *Manajemen Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

CVTA 2010. *Bedoman Penelitian*. Penelitian dan Tesis Tula. Tulungagung: Akademi Kepolisian Semarang.

Harlow, Suwandi. 2008. *Manajemen Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

CVTA 2010. *Bedoman Penelitian*. Penelitian dan Tesis Tula. Tulungagung: Akademi Kepolisian Semarang.

Harlow, Suwandi. 2008. *Manajemen Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

CVTA 2010. *Bedoman Penelitian*. Penelitian dan Tesis Tula. Tulungagung: Akademi Kepolisian Semarang.

Faktor pengantar yang muncul di antara tindakan politik dan kebijakan komunikasi dan berdasar pada yang dikemukakan oleh Raymond V. Jacker diuraikan empat faktor yang mempengaruhi ketelitian komunikasi organisasi yaitu selain komunikasi formal, struktur wewenang organisasi, dan jenis pekerjaan, dan ada yang disebut sebagai informasi

2. Struktur Organisasi
 Efektivitas simbol di atas perlu menyatakan beberapa hal yang perlu (1) Melaikan untuk struktur organisasi yang baik dan efisien mampu dengan sebagai hasil yang sangat penting dan berharga, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan struktur organisasi yang baik dan efisien.